

# Kemenkes Tata Ulang Laboratorium Kesehatan di Indonesia, Siap Deteksi Berbagai Penyakit!

Penataan ulang dilakukan mulai dari penambahan jumlah Laboratorium hingga kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Labkesmas.

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Kesehatan RI menata ulang laboratorium kesehatan sebagai upaya transformasi kesehatan di Indonesia.

Penataan ulang dilakukan mulai dari penambahan jumlah Laboratorium hingga kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas).

Saat ini jumlah Laboratorium yang dapat melakukan diagnosis penyakit masih terbatas, ke depan seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksaan sampai pelayanan primer.

Dinkes provinsi, kabupaten/kota diminta meningkatkan kapasitas Labkesmas. Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril mengatakan salah satu upaya preventif mewujudkan sistem ketahanan kesehatan yakni dengan melalui pembangunan fasilitas-fasilitas untuk deteksi dini kesehatan seperti Labkesmas dan laboratorium genome sequence.

“Perlu mereformasi Labkesmas untuk mengoptimalkan upaya preventif. Ditargetkan setiap Puskesmas bisa melakukan layanan laboratorium misalkan 100 kali tes, kemudian di atasnya laboratorium kesehatan kabupaten/kota, di atasnya lagi

laboratorium provinsi, kemudian regional, dan nasional,” ujar dr. Syahril.

Nantinya, Labkesmas fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Penataan ulang Labkesmas merupakan bagian dari pendekatan siklus kehidupan pada integrasi layanan primer di Puskesmas.

Sebagai informasi, integrasi layanan primer dilakukan dengan pendekatan kluster, yaitu kluster ibu hamil, anak dan remaja, kluster usia produktif dan lansia, serta kluster penanggulangan penularan penyakit atau surveilans, termasuk laboratorium Puskesmas.

Pengembangan Lab PCR juga terus dilakukan sebagai bagian dari surveilans memantau adanya potensi virus baru seperti virus flu burung dan virus marburg.

Selain itu pengembangan Lab dilakukan untuk mendukung kebijakan deteksi 14

penyakit.

Dalam upaya penataan ulang Labkesmas di Indonesia, Kemenkes menetapkan kategori Lab dan menambah jumlah Lab berdasarkan rekomendasi WHO.

Lab di Puskesmas dengan kategori Lab non biosafety level (BSL) akan dipenuhi sebanyak 10.374, Labkesmas di kabupaten / kota dengan kategori BSL 2 sebanyak 231, Labkesmas di provinsi dengan kategori BSL 2 sebanyak 28, Labkesmas regional dengan kategori BSL 2 sebanyak 12, dan Labkesmas nasional dengan kategori BSL 3 sebanyak 2 Lab.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sudah meminta CDC mendukung pembangunan Labkesmas nasional di Indonesia dalam bentuk kerjasama kemitraan dan tenaga ahli.

Budi juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama rumah sakit di

Indonesia dengan rumah sakit di AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, UCLA).

Selain itu, Indonesia juga sudah meminta Korea untuk aktif mendukung pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) yang akan memainkan peran penting untuk surveilans dan kapasitas laboratorium dalam mendeteksi penyakit menular berpotensi wabah, serta institusi yang membangun ketahanan kesehatan di tingkat ASEAN.

“Transformasi memang tidak mudah, butuh kerja keras, cerdas, sinergi, kolaborasi, termasuk keteguhan hati dalam memulai dan menjalankannya. Hilangkan ego sektoral, kita sama-sama berpikir luas, jangka panjang, untuk kepentingan masyarakat luas,” tutur dr. Syahril. ● tom



**JAKARTA (IM)** - Menunda waktu tidur bahkan hanya 34 menit dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi, menurut studi dalam jurnal Hypertensi.

Studi itu melibatkan sebanyak 12.287 orang laki-laki dewasa yang kelebihan berat badan dan berada pada usia pertengahan.

Mereka ini berasal dari 20 negara berbeda dan ada di antara mereka yang terkena hipertensi.

Peneliti juga mempelajari durasi waktu tidur dan risiko hipertensi. Orang yang tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit yakni tidur kurang dari tujuh atau lebih dari sembilan jam secara konsisten berpotensi terkena hipertensi sebesar 20%-30%.

Selain itu, orang dengan jumlah jam tidur yang berbeda setiap malam, sebanyak dua jam atau lebih berpeluang 85 persen lebih tinggi untuk mengalami hipertensi.

Menurut pakar kardi-

ologi dari University Hospitals Harrington Heart and Vascular Institute Saderr Al-Kindi, MD, mengingat latar belakang eserta penelitian yang sebagian besar laki-laki, setengah baya, dan kelebihan berat badan, maka ada kemungkinan temuan ini tak bisa diterapkan pada populasi global yang lebih luas.

Orang yang berusia lebih muda, wanita, atau orang yang tidak kelebihan berat badan mungkin tidak berpeluang terkena hipertensi dari kebiasaan tidur yang tidak teratur.

Tetapi mengingat beta-pa umum orang mengubah waktu tidur dan durasi tidur mereka, baik untuk bekerja maupun alasan lainnya, hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi besar.

Tekanan darah tinggi ditunjukkan dengan angka hasil pengukuran tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau lebih tinggi dan para peneliti menemukan durai yang tidak teratur dapat dianggap sebagai penanda risiko untuk kesehatan jantung yang buruk. ● tom

## SAMBUNGAN

(Kemenkeu), Mahfud ditemani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto.

Mahfud memasuki ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, bersamaan dengan anggota Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lainnya. Mereka adalah Sri Mulyani, Komjen Agus, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipekhusus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan.

Pada rapat kali ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memimpin rapat.

Mahfud dan Sri Mulyani pun tampak melambatkan tangan kepada seluruh hadirin di ruang rapat Komisi III DPR sebelum rapat dimulai.

Adapun rapat ini merupakan rapat lanjutan antara Komisi III DPR dan Komite Nasional TPPU yang digelar pada Selasa (21/3) lalu. Sebelumnya, pemerintah melalui Komite Nasional TPPU akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada Senin (10/4), Komite Nasional TPPU yang dipimpin Mahfud MD telah menggelar rapat untuk kelima kalinya setelah komite tersebut mengadakan rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada 29

Maret 2023 lalu.

Rapat tertutup yang digelar di Kantor Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartanto (Wakil Komite Nasional TPPU), Menteri Keuangan Sri Mulyani (Anggota Komite Nasional TPPU), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Anggota Komite Nasional TPPU), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Agus Andrianto (Anggota Komite Nasional TPPU), dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (Sekretaris Komite Nasional TPPU).

Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi pers terkait tindak lanjut dugaan TPPU di lingkungan Kemenkeu tersebut. Dalam konferensi pers, Senin kemarin, Mahfud menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan.

“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite (TPPU) di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023,” ujar Mahfud kepada para wartawan.

Data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni Data Agregat Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK

2009-2023. “Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda,” kata Mahfud.

Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai Rp 349 triliun. Sebab, sebelumnya, Mahfud menyampaikan data yang berbeda dengan Sri Mulyani saat gelaran rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III DPR, 29 Maret 2023.

Dalam rapat tersebut, Mahfud menyebutkan transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan pegawai Kemenkeu nilainya mencapai Rp 35 triliun. Nilai ini menjadi berbeda dengan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni sebesar Rp 3,8 triliun. ● mar

## DARI HAL 1

### DPR Tagih Data Transaksi Janggal...

membawa istri dan 2 anak saya, saya harus membayar RM1,000 (Rp3,4 juta),” tulisnya, dikutip World of Buzz.

Menurut postingan tersebut, netizen tersebut telah menerima undangan pesta pernikahan yang akan berlangsung di Rawang.

Saat dia membuka amplopnya, sebuah paket merah terlihat menampilkan harga yang harus dibayar untuk datang ke pernikahan itu.

Paket merah itu menyatakan bahwa para undangan

harus membayar sebesar RM250 (Rp842.000) untuk menghadiri pernikahan.

Para tamu juga dapat melakukan transfer online banking dan e-wallet sejumlah uang jika tidak ingin menggunakan uang tunai.

Jika mereka melakukannya, maka mereka harus mencetak kuitansi dan memasukkannya ke dalam paket merah untuk konfirmasi oleh staf resepsi.

Sontak saja hal ini langsung membuat media sosial

(medsos) riuh ramai. Para warganet seolah tak bisa menahan jari-jemarinya untuk tidak berkomentar.

Netizen yang memposting foto tersebut dengan sinis mengatakan dalam kerangannya bahwa ini adalah “langkah yang bagus”.

“Jika saya memberi lebih sedikit maka orang akan tidak puas, jika saya memberi lebih banyak maka saya akan bangkrut. Tidak ada paksaan di sini, hanya datang jika Anda mampu. Saya harap

tuan rumah akan memberi saya tanda terima setelah saya membayar,” terangnya.

Banyak netizen lain yang banyak bicara tentang masalah ini.

“Anda mengundang orang ke makan malam pernikahan, jika mereka tidak memberikan paket merah kepada Anda, tidak apa-apa karena Anda mengundang mereka untuk kehadiran mereka. Jika Anda tidak mampu mengadakan makan malam pernikahan maka jangan lakukan, jelas

mereka berusaha menghasilkan uang dari ini,” ujar seorang warganet.

Pengguna Facebook lainnya memutuskan untuk mengambil jalan sarkasme.

“Saya ingin memberi Anda RM888 tetapi untungnya Anda menyatakan RM250 pada paket merah. Saya telah menghemat sejumlah uang,” terang warganet lainnya.

“Apakah ada diskon untuk orang tua?,” tanya warganet lainnya. ● osm

### Geger, Tamu Pesta Disuruh Bayar...

### PT DKI Jakarta Gelar Sidang Pembacaan...

Sedangkan perkara atas nama Kwat Maruf dikuatui oleh Abdul Fattah dengan anggota majelis Singgih Budi Prakoso, Ewit Soetriadi, H Mulyanto dan Tony Priyadi.

Dalam kasus ini, terdapat lima terdakwa. Selain keempat terdakwa tadi, terdapat satu terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Namun, untuk Richard, baik jaksa atau tim kuasa hukum tidak melayangkan

banding. Kelima terdakwa dinilai majelis hakim telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu.

Dalam putusannya, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada

para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Bharada E pidana 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan.

Sementara itu, Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Putri Candrawathi, Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga

divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim memvonis ketiganya selama delapan tahun.

Istri Ferdy Sambo itu divonis 20 tahun penjara, Kwat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara.

Adapun pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang,

Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022.

Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat jenderal bintang dua marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J dieksekusi dengan cara ditembak dua-tiga kali oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. ● mar

### Terekam, Pengemis Buta Pulang...

tersebut awalnya menunjukkan bagaimana pasangan pengemis (laki-laki dan perempuan) pergi ke restoran untuk meminta sumbangan kepada orang-orang yang berada di sana.

Setelah selesai memintaminta, keduanya kemudian terlihat berjalan menuju persimpangan jalan sebelum berbelok ke kanan dan ka-

mera terfokus pada sebuah mobil putih yang diparkir di persimpangan tersebut. Kemudian adegan beralih ke jalan yang berbeda.

Nah, di sana, pasangan pengemis itu terlihat masuk ke mobil putih yang tampak telah menunggu mereka di pinggir jalan. Pria itu duduk di kursi depan sementara perempuan itu duduk di belakang.

“Dengan asumsi terbaik, mungkin mereka masuk ke mobil Grab,” tulis Dharshan.

Posting video ini banyak dikomentari oleh warganet “Negeri Jiran”. Beberapa menduga pengemis itu terlibat dalam sebuah sindikat.

“Eh, ketika mereka jauh dari orang-orang, tiba-tiba mereka terlihat baik-baik saja dan bisa berjalan cepat,” tutur

seorang pengguna Twitter sebagaimana dikutip dari World of Buzz. Ada juga pengguna Twitter yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa.

“Ini pernah terjadi pada saya, setelah para pengemis pergi, mereka menyeberang jalan dengan normal dan naik mobil mahal,” bebarnya.

Pengguna Twitter lain tidak yakin jika pengemis itu

naik Grab seperi yang disampaikan Dharshan.

“Jika mereka benar-benar menggunakan Grab, maka bisa melihat sisi baiknya. Tapi mereka berjalan cepat seolah-lah dia tiba-tiba tidak memiliki kemampuan visual yang berbeda, bagaimana cara berpikir yang terbaik?” ungkap warganet Malaysia lainnya. ● osm

### KPK Larang Pejabat Negara...

para penyelenggara negara dilarang menerima hadiah ataupun uang dalam rangka Tunjangan Hari Raya (THR) di luar yang merupakan haknya. KPK meminta agar pimpinan di instansi negara masing-masing membuat aturan tegas perihal larangan tersebut

“Pimpinan kementerian/l lembaga/pemerintah daerah dalam BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

tugasnya,” ujarnya.

Di samping itu, KPK juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak memberikan apapun kepada penyelenggara negara. Sebab, hadiah dalam bentuk apapun masuk ke dalam kategori gratifikasi. Hal itu, dilarang dalam

aturan perundang-undangan.

“Pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan memberikan anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lain-

nya,” imbau Ipi.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” imbuhnya. ● han

## SAMBUNGAN

### Dewas Mulai Proses Laporan Pencopotan...

Direktur Penyelidikan KPK ke Dewas. Ender mengaku telah menyerahkan seluruh dokumen dan menceritakan secara singkat pencopotan jabatan dirinya ke Dewas.

“Pengaduan saya sudah diterima, ini pengaduan saya (nunjukin dokumen), kemudian ya kita tinggal menunggu proses dari dewas. Tentunya dewas punya standar operasional prosedur mereka untuk menindaklanjuti laporan dari kami,” kata Ender di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4) lalu.

Pelaporan Ender ke Dewas merupakan buntut pemberhentian dirinya dari jabatan Dir Lidik KPK. Selain diberhentikan, KPK juga sudah mengirimkan surat pengembalian

Brigjen Ender Priantoro ke instansi asalnya yakni, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pemberhentian sekaligus pemulangan Ender ke Korps Bhayangkara tersebut tidak sejalan dengan surat keputusan yang telah dikirim Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke pimpinan KPK.

Di mana sebelumnya, Kapolri menyuruh pimpinan KPK yang intinya menugaskan kembali Ender untuk tetap menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

Namun, surat tersebut tidak digubris oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK menolak keputusan Kapolri yang tetap menugaskan kembali Ender di lembaga antirasuah.

Bahkan, KPK telah menunjuk Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Ronald Worotikan untuk mengisi jabatan Direktur Penyelidikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). ● mar

## InternationalMedia

**PEMIMPIN REDAKSI:** Osmar Siahaan  
**PELAKSANA HARIAN:** Lusi J, Bambang Suryo Sularso.  
**PENANGUNG JAWAB:** Prayan Purba.  
**KORDINATOR LIPUTAN/FOTO:** Sukris Priatmo.  
**REDAKSI:** Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.  
**ARTISTIK:** M Rifki, James Donald, Indra Saputra.  
**SIRKULASI-PROMOSI:** A Susanto, Nurbayin, Ahyar, Ferry.  
**AGEN:** SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen). **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIKPAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jeffri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.  
**KEUANGAN/IKLAN:** Citta.  
**BIRO BOGOR:** Subagyo (Kepala Biro), Jaidarman.  
**BIRO TANGERANG:** Johan (Kepala Biro).  
**BIRO BEKASI:** Madong Lubis (Kabiro).  
**BIRO SEMARANG:** Tri Untoro.  
**BIRO BANDUNG:** Lyster Marpaung.  
**BIRO BANTEN:** Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).  
**BIRO LEBAK:** Nofi Agustina (Kabiro).  
**BIRO JAMBI:** Beni, Ratusas Sabar Riah, Rts Zuchriah.  
**HARGA ECERAN:** Rp 2.500./eks (di luar kota Rp 3.000./eks), Harga Langganan Rp 50.000./bulan.  
**PERCETAKAN:** PT. International Media Web Printing  
**ALAMAT:** Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3  
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720  
 Tel : 021-6265566  
 Twitter: International Media @redaksi\_IM